

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah



Menara HIK Jl. HOS Cokroaminoto No 17 Karang Timur,
Karang Tengah, Kota Tangerang Telp. (021) 7301456
www.bprshik.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	2
BAB II LAPORAN TRANPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	3
A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri Atas Pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah	3
1. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite	4
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	8
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	12
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	14
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	14
b. Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi	16
B. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Anggota Direksi	17
1. Kepemilikan Saham Direksi	17
2. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	17
3. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	17
C. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga Dewan Komisaris, DPS dan Rangkap Jabatan Anggota DPS	17
1. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	17
2. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris	18
3. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris	18
4. Kepemilikan Saham DPS	18
5. Hubungan Keuangan Anggota DPS	18
6. Hubungan Keluarga Anggota DPS	19
7. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain	19
D. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS	19
E. Rasio Gaji Tinggi dan Terendah	20
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan DPS	21
1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 Tahun	21
2. Kehadiran Anggota Dewan Direksi	25
3. Penyelenggaraan Rapat DPS dalam 1 Tahun	25
4. Kehadiran Anggota DPS	26
G. Jumlah Penyimpanan Intern (Internal Fraud)	27
H. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR Syariah	27
I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	28
J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	28

h

BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Alamat Kantor	: Menara HIK, Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
Nomor Telepon	: 021-730 1456.
Penjelasan Umum	<p>: Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola secara format mengacu kepada POJK 09 Tahun 2024 (Tata Kelola BPR BPRS) dan POJK 25 Tahun 2024 (Tata Kelola Syariah) serta POJK Nomor 23 tahun 2024 (Pelaporan). Hal ini dikarenakan sampai dengan bulan April 2025, belum ada ketentuan pelaksanaan atau SEOJK Penerapan Tata Kelola Syariah, sehingga BPR Syariah Harta Insan Karimah menyusun Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola yang memuat data yang dibutuhkan untuk pengisian data Pelaporan yang sesuai format pada Apolo Modul Laporan Tahunan dan sesuai dengan POJK Tata Kelola yang berlaku, antara lain menyajikan data sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Ringkasan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.B. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi.C. Kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.D. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.E. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.F. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.G. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah.H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah.I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain.

BAB II
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH

BPR Syariah Harta Insan Karimah telah melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu : Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Dari ketiga aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPR Syariah;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum penyaluran dana;
10. Rencana Bisnis BPRS;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.

1. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola

Adapun hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah Harta Insan Karimah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,06	Sangat Baik
ANALISIS	
Berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> , pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah Harta Insan Karimah telah cukup memenuhi persyaratan Tata Kelola yang ditetapkan dalam POJK 24/POJK.03/2018, sebagai berikut :	
I. Kesesuaian Saat Ini	
<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan jumlah Modal Inti BPRS HIK (paling sedikit Rp.50 milyar), telah terpenuhi kelengkapan struktur Tata Kelola yakni Formasi 3 (tiga) Anggota Direksi, keseluruhan Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.2. Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.3. Telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.4. Telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.	

II. Identifikasi Masalah

BPR Syariah Harta Insan Karimah saat ini tengah menelaah POJK 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta POJK 25/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPRS, yang hingga penilaian sendiri (*Self Assessment*) dilakukan belum terdapat ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk SEOJK. Ketentuan Pelaksanaan ini masih ditunggu sehingga penerapan Struktur dan Infrastruktur, Proses, serta Hasil Penerapan Tata Kelola yang mengacu pada POJK yang terbit pada tahun 2024 tersebut menjadi lebih jelas implementasinya.

III. Rencana Tindak Lanjut

BPR Syariah Harta Insan Karimah, terus melakukan telaah internal dan mengkonsultasikan kepada Dewan Komisaris dan DPS perihal implementasi POJK 9/2024 dan POJK 25/2024, sembari tetap menunggu terbitnya ketentuan pelaksanaan atau SEOJK Penerapan Tata Kelola BPRS yang mengacu pada POJK 9/2024 dan POJK 25/2024, sehingga ada acuan yang lebih jelas.

IV. Target Waktu

Telaah atas POJK 9/2024 dan POJK 25/2024 telah dan akan terus dilanjutkan pada Semester I - 2025 dengan tetap menunggu terbitnya ketentuan pelaksanaan dari kedua POJK tersebut.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Dan Komite.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Harta Insan Karimah, Akta Notaris Nomor 19 tanggal 26 Maret 2024 perihal susunan pengurusan PT BPR Syariah Harta Insan Karimah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Alfi Wijaya	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun strategi dan arah kebijakan Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.2. Menyusun strategi dan arah kebijakan strategis terkait penyelesaian nasabah bermasalah, <i>Risk Management & Corporate Transformation</i> serta <i>Audit Internal</i>.3. Melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BPRS dan

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjalankan pengelolaan perusahaan dengan harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 5. Menerapkan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS. 8. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas Divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Intern), <i>Risk Management & Corporate Transformation dan Special Asset Management & Recovery</i>. 9. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Utama berjalan dengan baik. 10. Memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan, tanggapan Komite Legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 11. Bersama-sama jajaran Direksi lain bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2.	Rahmat Mauludin	Direktur Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan terkait aspek bisnis. 2. Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>penghimpunan dana (baik produk Tabungan maupun Deposito).</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun strategi dan arah kebijakan rencana bisnis dalam bidang penyaluran dana (Pembiayaan), termasuk monitoring proses penagihan angsuran khususnya nasabah lancar dan menjaga nasabah lancar agar tidak flow menjadi nasabah bermasalah. Melakukan monitoring perkembangan bisnis penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan di Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas Divisi Bisnis. Memastikan agar koordinasi, kolaborasi dan komunikasi antar unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Bisnis berjalan dengan baik. Memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3.	Denny Satria Irawan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Syariah tidak menyimpang dari ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah; serta kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinions</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPR Syariah, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait ketentuan intern,

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip Syariah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaporkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai maupun Direksi BPR Syariah. 5. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. 6. Menyusun strategi dan arah kebijakan. Melakukan supervisi langsung termasuk menyusun kebijakan dan prosedur serta melakukan review kinerja unit kerja tersebut. 7. Memastikan kelengkapan dan akurasi serta ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang disampaikan ke OJK, LPS, dan Kantor Instansi lainnya. 8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Syariah Harta Insan Karimah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. 9. Melakukan persetujuan atas transaksi keluar masuk dana dalam limit tertentu dan tanggapan Komite Legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

h J

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai target RBB 2024 melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring proses revitalisasi organisasi. b. Fokus pada pencapaian target portofolio dan laba perusahaan serta rencana pengembangan produk dan aktivitas baru yang tercantum dalam revisi RBB 2024. c. Fokus mengawal peningkatan kualitas pembiayaan dan penurunan NPF. d. Fokus dalam menyusun dan melaksanakan upaya-upaya untuk penyelesaian nasabah bermasalah. 2. Direksi telah melakukan upaya penyelamatan portofolio KSPPS KUMB, berkoordinasi dengan Lawyer BPR Syariah Harta Insan Karimah untuk mendapat opini hukum, penguatan monitoring, penugasan personil di Kantor KUMB, perumusan konsep, mekanisme pembiayaan, pengikatan, dan upaya mendapat tambahan agunan atau asset Kantor Pusat KUMB serta peralihan skema <i>channeling</i> menjadi skema <i>direct financing</i>. 3. Direksi telah melakukan pemetaan atas <i>critical issue</i> atas dampak kinerja 4. Direksi telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka upaya penggabungan BPRS HIK Bekasi dengan BPRS HIK. 5. Direksi telah melakukan penguatan struktur organisasi salah satunya dengan adanya fungsi <i>Financing Business, Collection & Recovery Department (FBCR)</i> dan <i>Business Innovation & Retail Funding (BIRF)</i> sebagai pengembangan dari Unit Kerja Divisi Bisnis. 6. Direksi telah melakukan pemetaan data nasabah potensial, Nasabah Tabungan lama yang berpotensi untuk migrasi dan meningkatkan saldo, melakukan agenda silaturahmi, melakukan pemasaran dengan postingan di media digital atau video promosi, media <i>broadcast</i> email atau WA, melakukan agenda SMS dan HIK <i>Goes to School</i> pada tahun 2024. 	

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama & Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi Komisaris Utama untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Dewan Komisaris maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

h D

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah; dan, b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Noraini Bawazier	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. <p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
3.	Agus Darmawan	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Syariah. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah, dan</p> <p>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi
<ol style="list-style-type: none"> Direksi dapat terus fokus untuk mendorong pencapaian RBB 2024 dan dapat melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan. Direksi terus dapat secara maksimal mencari solusi dan langkah-langkah dalam upaya penyelesaian penyelamatan pembiayaan KSPPS KUMB di BPR Syariah Harta Insan Karimah. Direksi dapat menindaklanjuti <i>critical issue</i> hasil pemeriksaan OJK Tahun 2024 dimana implikasi terbesar atas hasil pemeriksaan tersebut adalah pada aspek keuangan yakni terdapatnya kenaikan NPF, PPAP yang akan menekan laba perusahaan. Direksi dapat menyusun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait permasalahan HIK Bekasi melalui proses merger dengan BPR Syariah Harta Insan Karimah. Direksi agar melakukan penguatan manajemen risiko terhadap pembiayaan segmen komersial dan pengembangan pembiayaan segmen retail. Direksi dapat melakukan rencana-rencana strategis yang akan dilakukan untuk pencapaian akhir tahun, khususnya untuk pendanaan (<i>Funding</i>) terutama dalam peningkatan portofolio Tabungan.

h g

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dede Abdul Fatah	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi Ketua DPS untuk mengkoordinir pelaksanaan aktivitas DPS maupun berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Mengevaluasi kebijakan dan Standar Prosedur Operasional BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPR Syariah yang belum ada fatwanya. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah. 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK.
2.	Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPR Syariah yang belum ada fatwanya. 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah. 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada OJK .

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

DPS telah memberikan Opini Sebanyak 17 Opini dengan pokok pembahasan : Proses Penyelesaian & Penyelamatan KSPPS KUMB, Penggunaan Dana Kebajikan dan Dana Zakat dalam Rangka Mendanai Mushola Graha, Titipan Nasabah Atas Proses Notarial, Premi Asuransi, Blokir BPKB & No Name, Proses Penyelamatan Portofolio KSPPS KUMB (Lanjutan), Pembiayaan Sindikasi & *Joint Financing* BPR Syariah Harta Insan Karimah Dengan HIK Bekasi, Mitigasi Risiko Penyelesaian Dana Tabungan KSPPS KUMB, Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara BPR Syariah Harta Insan Karimah Dengan KSPPS KUMB, Perjanjian Peralihan Skema Pembiayaan *Channeling* Melalui KUMB Menjadi Skema SDF, Rencana Peralihan Skema *Channeling* Melalui KSPPS KUMB Menjadi SDF Oleh BPR Syariah Harta Insan Karimah, Mekanisme *Fee Collection* Pembiayaan Sindikasi & *Join Financing* BPR Syariah Harta Insan Karimah & HIK Bekasi, Penyelenggaraan Produk Dasar Baru PUMBK, Alokasi Uang Pemberian Nasabah Pembiayaan Kepada AO Yang Dikembalikan AO, SRIA *Mudharabah Muqayyadah*, Sop Pembiayaan *Murabahan*, Sindikasi dan/atau *Joint Financing* BPR Syariah Harta Insan Karimah Dengan Mitra BPR Syariah Lainnya, *Hawalah* Atau *Cessie*, Penggunaan Dana Payung Kebersamaan dan Mitigasi Risiko Tabungan Untuk Pembayaran Angsuran Nasabah.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
187/HIK/VIII/2024	16 Agustus 2024	265/HIK/XII/2024	24 Desember 2024

h j

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Progam Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	<p>1. Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan pada kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan potensi pendapatan BPRS pada masa yang akan datang.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <p>a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan</p>	<p>1. Memberikan rekomendasi mengenai calon pengurus Bank baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>2. Membuat kebijakan Remunerasi bagi Pengurus & Pegawai</p>	<p>1. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>2. Memberikan rekomendasi</p>	

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
		<p>Komisaris, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.</p> <p>4. Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p>		<p>mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris , dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi besaran remunerasi tahun 2024 untuk pengurus (Dewan Komisaris , Direksi & Dewan Pengawas Syariah) untuk disampaikan kepada RUPS.</p>	

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

h j

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1	Zahrul Hadiprabowo	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Ketua Komite	Nihil	Nihil	Nihil
2	Noraini Bawazier	Komisaris	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil	Nihil	Nihil
3	Agus Darmawan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil	Nihil	Nihil
4	Ida Syofiatulhuda	<i>Human Capital & Corporate Culture Department Head</i>	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil	Nihil	Nihil
5	Irwan Maulana	Perwakilan Pemegang Saham Pengendali (PT Induk HIK)	Nihil	Nihil	Anggota Komite	Nihil	Nihil	Nihil

B. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI**1. Kepemilikan Saham Direksi**

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Alfi Wijaya	Rp.81.100.000,-	0,17	Rp.81.100.000,-	0,17
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Alfi Wijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Rahmat Mauludin	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Denny Satria Irawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

C. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH(DPS) DAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN**1. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Zahrul Hadiprabowo	Nihil	Nihil	Nihil	Endang Wardiyati - Istri Rais Nur Arief - Anak Ulya Khalid - Anak Salwa Fauzia - Anak
2.	Noraini Bawazier	Nihil	Nihil	Nihil	Mohammad Yamin - Saudara Kandung
3.	Agus Darmawan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama Anggota DPS	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. Hubungan Keuangan Anggota DPS

No.	Nama Anggota DPS	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

6. Hubungan Keluarga Anggota DPS

No.	Nama Anggota DPS	Hubungan Keluarga			
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.	Dede Abdul Fatah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

7. Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No.	Nama Anggota DPS	Rangkap Jabatan			
		Anggota DPS BPR Syariah Lain	Anggota DPS LJKS	Anggota Komisaris LJK Lain	Jabatan Pada Organisasi/Perusahaan/Badan Usaha Lain
1.	Dede Abdul Fatah	BPRS Hikmah Bahari (620174) BPRS AI - Barokah (620053)	Nihil	Nihil	Ketua DPS Anggota DPS
2.	Sutedjo Prihatono	Nihil	BCA Syariah (536)	Nihil	Anggota DPS

D. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1	Gaji Pokok	3	2,208,506,925	3	1,140,164,472	2	386,841,516
2	Tunjangan	3	555,815,255	3	259,887,572	2	139,664,069
3	Tantiem	3	379,310,414	3	230,857,902	2	78,326,788
4	Bonus	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
5	Kompensasi Berbasis Saham	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
6	Remunerasi-Lainnya*)	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil

h j

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
	Total Remunerasi		3,143,632,594		1,630,909,946		604,832,373
B	Fasilitas Lain						
1	Perumahan	3	Nihil	3	Nihil	2	Nihil
2	Transportasi	3	533.560.372 (1 unit mobil dinas per Direksi)	3	Nihil	2	Nihil
3	Kesehatan	3	66.379.250 (Asuransi Kesehatan + Keluarga inti, MCU + Pasangan)	3	7.878.000 (Fasilitas MCU Komisaris + Pasangan)	2	5.252.000 (Fasilitas MCU DPS + Pasangan)
4	Fasilitas Lain-Lainnya*)	3	60.562.495 (Laptop, HP, Tablet Smartphone)	3	Nihil	2	Nihil
	Total Fasilitas Lain		660.502.117		7.878.000		5.252.000
C	Total						
	Remunerasi dan Fasilitas Lain		3.804.134.711		1.638.787.946		610.084.373

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1.28
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1.11
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	1.11
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	4.59
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	2.00
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	3.10

F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun (Januari s.d Desember 2024)

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	10 Januari 2024	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan & Rencana Strategis Perusahaan. 2. Laporan Progres Hasil Pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan PT BPRS HIK Tahun Buku 2023. 3. Laporan Realisasi atas Persetujuan Nasabah AYDA Tahun 2023 dan Nasabah Hapus Buku Tahun 2023.
2	18 Januari 2024	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023. 2. Pembahasan Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KAP. 3. Pembahasan Progress Penyusunan Laporan Keuangan (Audited KAP). 4. Pembahasan Usulan Tindak Lanjut RUPS (Penuntasan Audit KAP, PRA RUPS & RUPS). 5. Pembahasan Laporan Self Assesment TKS RBBR & Informasi Lainnya.
3	01 Februari 2024	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023. 2. Pembahasan Penyelesaian Nasabah Bermasalah (CV BJU dan PT TAR). 3. Informasi Lainnya .
4	12 Februari 2024	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023. 2. Pembahasan Penyelesaian & Penyelamatan KSPPS KUMB
5	19 Februari 2024	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023. 2. Pemaparan Laporan Audit Internal Tahun 2023. 3. Pembahasan Penyelamatan & Penyehatan KSPPS KUMB.
6	22 Februari 2024	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Penyelamatan & Penyehatan KSPPS KUMB.
7	29 Februari 2024	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pemeriksaan OJK (Laporan <i>Remedial Recovery</i>). 2. Pembahasan Rencana Re-Organisasi & Informasi Lainnya.

bj

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			3. Pembahasan Progres Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan KSPPS KUMB.
8	18 Maret 2024	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan OJK (<i>Critical Issue</i> dan Langkah-langkah Perbaikannya). 2. Laporan Evaluasi Kinerja <i>Remedial & Recovery</i>. 3. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan (Januari - Februari 2024). 4. Laporan Perkembangan Merger dengan BPRS HIK Bekasi 5. Pembahasan ALCO dan Update Informasi Progres Penyelesaian KUMB. 6. Informasi Lainnya (Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Lelang Ruang Gedung Graha BPRS & Royalti Laba BPRS HIK Tahun 2023).
9	04 April 2024	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Pembahasan Laporan Kinerja & Rencans Strategis Perusahaan. 4. Pembahasan Penyelesaian Pembiayaan CV BJU. 5. Pembahasan Penyelesaian & Penyelamatan KSPPS KUMB.
10	29 April 2024	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Progres Penyelesaian dan Penyelamatan KSPPS KUMB. 2. Pembahasan Progres Penyelamatan Nasabah Bermasalah dan Hapus buku (CV Bhatara Jaya Utama, PT Indomuda Satria Internusa dan Sandi Yanta Pinem). 3. Laporan Hasil Pemeriksaan "Transaksi Tidak Dikenal" Pada Aplikasi PPOB. 4. Pembahasan <i>Update</i> (Progres) Rencana Merger dengan HIK Bekasi.
11	14 Mei 2024	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja Bulan April 2024 dan Langkah Strategis Bulan Mei 2024.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah | 22

hd

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			4. Laporan Progress Penyelesaian Penyelamatan KSPPS KUMB.
12	28 Mei 2024	15	1. Pembahasan Progres Penyelesaian dan Penyelamatan KSPPS KUMB. 2. Informasi Lainnya.
13	7 Juni 2024	12	1. Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja (Aspek Bisnis). 2. Pembahasan Evaluasi Kinerja & Proyeksi NPF (<i>Remedial & Recovery</i>). 3. Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan Posisi Mei 2024 & Telaah Revisi RBB 2024. 4. Pembahasan ALCO (Rencana Pembukaan Deposito & Penurunan Nisbah BH Deposito). 5. Pembahasan Tindak Lanjut Audiensi OJK Terkait Merger 6. Pembahasan <i>Update</i> Informasi Terkait Koperasi Rizki Abadi (KOPRA). 7. Pembahasan Laporan Persiapan <i>Family Gathering</i> Tahun 2024
14	21 Juni 2024	15	1. Pembahasan Progres Penyelesaian Permasalahan KUMB. 2. Penyampaian Laporan Progres Persiapan Merger HIK dengan HIKB. 3. Penyampaian Informasi Lainnya
15	26 Juni 2024	10	1. Pembahasan Usulan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024. 2. Informasi dan Pembahasan Lainnya.
16	15 Juli 2024	17	1. Pembahasan Progres Penyelesaian Permasalahan KUMB. 2. Penyampaian Laporan Hasil Audit Pembiayaan Channeling KUMB. 3. Pembahasan Laporan Progres Penyusunan SOP PUMBK (Skema Direct Financing) dan Informasi Lainnya. 4. Lain-Lain.
17	02 Agustus 2024	10	1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2024 (Aspek Bisnis). 2. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2024 (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Rencana Strategis Perusahaan bulan Juli 2024. 4. Pembahasan ALCO.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah | 23

h f

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembahasan Progres Pembiayaan Bermasalah (PT Nady Kara, PT Tunas Alam, CV BJU dan Syahdan Hidayat). 6. Laporan Progress Merger BPRS HIK dengan HIK Bekasi. 7. Pembahasan Penawaran Permintaan Audit Laporan Keuangan PT BPRS Harta Insan Karimah oleh KAP Razikun Tarkosunaryo. 8. Informasi Lainnya.
18	22 Agustus 2024	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPSLB. 2. Laporan Evaluasi Kinerja & Proyeksi NPF. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Khusus Case Cabang Cikarang. 4. Informasi Lainnya.
19	12 September 2024	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2024 (Aspek Operasional & Kepatuhan). 2. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2024 (Aspek Bisnis). 3. Laporan Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2024 dan Rencana Strategis bulan September 2024. 4. Laporan Progres Perkembangan Merger BPRS HIK dengan HIKB. 5. Laporan Evaluasi Program Kerja SKAI BPRS HIK (Periode Jan - Agustus 2024). 6. Informasi Terkait Laporan <i>Self Assesment</i> - TKS BPRS HIK. 7. Penyampaian Analisa Opini Risk, Legal dan Lawyer terkait Pembelian dan Pencatatan Aset KSPPS KUMB. 8. Laporan Progres Penyelesaian Nasabah Bermasalah.
20	18 Oktober 2024	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III – 2024 & Rencana Strategis Triwulan IV – 2024. 2. Laporan <i>Self Assessment</i> TKS BPRS HIK (Posisi Desember 2023, Maret, Juni dan Desember 2024). 3. Laporan Program Kerja SKAI 2024 (Realisasi Program Kerja SKAI Januari – September 2024). 4. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 5. Pembahasan Informasi Progres Merger BPRS HIK dengan HIK Bekasi. 6. Pembahasan Informasi Progres PUMBK. 7. Informasi Lainnya.
21	26 November 2024	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2024. 2. Pembahasan Laporan <i>Self Assessment</i> TKS BPRS HIK.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah |24

hd

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			3. Pembahasan Laporan Kinerja Remedial (Pembiayaan Bermasalah). 4. Pembahasan dan Persetujuan Rencana Kerja Bisnis Bank Tahun 2025. 5. Informasi Lainnya.
22	17 Desember 2024	10	1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Bisnis). 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Aspek Operasional & Kepatuhan). 3. Laporan Evaluasi Kinerja Bulan November 2024 & Rencana Strategis Desember 2024. 4. Laporan Kinerja NPF Bulan November 2024 & Action Plan Desember 2024 (SAMR). 5. Laporan Proses Merger BPRS HIK dengan HIK Bekasi. 6. Informasi Lainnya.
23	30 Desember 2024	12	1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan (Prognosa Bisnis). 2. Pembahasan Estimasi NPF Bulan Desember 2024 & Usulan Hapus Buku. 3. Pembahasan Prognosa Neraca dan Laba Rugi. 4. Pembahasan Prognosa Permodalan. 5. Pembahasan Telaah BMPD

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Zahrul Hadiprabowo	22	1	100%
2	Noraini Bawazier	19	4	100%
3	Agus Darmawan	22	1	100%

3. Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	19 Februari 2024	8	1. Pembahasan <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD).
2	26 Maret 2024	11	1. Pembahasan hasil pemeriksaan OJK. 2. Pembahasan Lelang Graha BPRS. 3. Pembahasan Pengelolaan dan Pendanaan Operasional Rumah Peradaban.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
3	25 April 2024	8	1. Pembahasan permohonan Opini Proses Penyelesaian dan Penyelamatan KSPPS KUMB.
4	13 Mei 2024	7	1. Pembahasan Opini pembiayaan sindikasi atau <i>Joint Financing</i> BPR Syariah HIK Ciledug dengan BPR Syariah HIK Bekasi.
5	11 Juni 2024	12	1. Penggunaan Sisa Hasil Penjualan Jaminan KSPPS KUMB.
6	14 Juni 2024	11	1. Pembahasan Rencana Peralihan Skema Channeling melalui KSPPS KUMB Menjadi Skema <i>Direct Financing</i> oleh BPR Syariah HIK.
7	16 Agustus 2024	11	1. Pembahasan Uji Petik DPS Semester I.
8	20 September 2024	12	1. Pembahasan Murabahah.
9	03 Oktober 2024	10	1. Pembahasan Murabahah Lanjutan.
10	01 November 2024	10	1. Pembahasan Pembiayaan Sindikasi dan/atau <i>Join Financing</i> BPRS HIK dengan Mitra BPRS Lainnya. 2. Pembahasan Penarikan Dana Payung Kebersamaan Untuk Angsuran.
11	24 Desember 2024	11	1. Pembahasan Uji Petik DPS Semester II

4. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota Dewan DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dede Abdul Fatah	11	0	100%
2	Sutedjo Prihatono	10	1	100%

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	1	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	1	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) perbaikan data di tahun sebelumnya

H. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPRS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPRS HIK selama periode tahun 2024 adalah 8 (Delapan) kasus perdata yang kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR Syariah HIK disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	8	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	0	Nihil
Total	8	Nihil

Semua kasus telah tuntas diselesaikan, sehingga tidak ada yang masih dalam proses penyelesaian (nihil).

bj

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Syariah Harta Insan Karimah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak-pihak lain sehingga insan BPR Syariah HIK tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang diberikan BPRS kepadanya.

BPR Syariah Harta Insan Karimah telah memiliki kode etik penanganan benturan kepentingan perusahaan yang menjadi ketentuan dan/atau panutan nilai dalam penanganan benturan kepentingan di dalam Perusahaan.

Selama tahun 2024 PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Tidak Memiliki Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

J. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Selama Tahun 2024 PT BPR Syariah Harta Insan Karimah tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu, sedangkan penyaluran dana untuk kegiatan sosial di jelaskan sebagai berikut:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	28 Maret 2024	Sumbangan Buka Puasa Besama & Santunan Anak Yatim & Dhuafa	Masjid Nurul Falah (Ibu Daru Asih)	2,000,000
2	1 April 2024	Paket Bingkisan Ramadhan (Paket Sembako)	Kaum Fakir & Miskin disekitar KP, KC & KK	25,000,000
3	1 April 2024	Berbagi Takjil & Buka Puasa Ramadhan	Kaum Fakir & Miskin disekitar KP, KC & KK	17,500,000
4	3 April 2024	Bingkisan Tunai Guru Mengaji	Kaum Fakir & Miskin KP & KC	27,000,000
5	3 April 2024	Bantuan Tunai Marbot Mesjid	Kaum Fakir & Miskin KP & KC	18,000,000
6	2 April 2024	Bukber & Baksos Tokoh Agama, Guru Ngaji, Marbot	Masjid Nurul Islam (Bapak Cecep Saeful A)	1,000,000

No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		Masjid, Lansia, Dhuafa & Anak Yatim		
7	Setiap Bulan pertanggal 20	Bantuan beasiswa	Bantuan Beasiswa untuk sekolah mitra HIK (posisi 2 Des 2024)	104,991,894
8	3 April 2024	Donasi Peduli Kemanusiaan untuk Palestina	Sinergi dengan ASBISINDO	5,000,000
9	5 April 2024	Donasi Peduli Kemanusiaan untuk Palestina	Tambahan Donasi Palestina	5,000,000
10	5 April 2024	Lelang Graha BPRS	Kontribusi PT BPRS HIK untuk lelang musholla infrastruktur dan operasional Graha BPRS	75,000,000
11	17 Mei 2024	Bantuan Peduli Bencana Alam Sumbar (Kolaborasi ASBISINDO)	Bantuan Peduli Bencana Sumbar	5,000,002
12	28 Mei 2024	Bantuan Beasiswa An.Yusep (Rekomendasi Bpk Dede Abdul Fatah)	Bantuan beasiswa An.Yusep	2,000,000
13	24 Oktober 2024	Rumah Peradaban	Bantuan perbaikan rumah peradaban (tahap 1)	5,023,000
14	Sesuai tanggal pengajuan permintaan sumbangan	Total Santunan-santunan (pengajuan proposal bantuan)	Bantuan santunan/sumbangan atas prosposal pengajuan	15,150,000
15	30 - 31 Des 24	Bantuan Beras kepada Mitra Pon Pes dan Panti HIK	Bantuan Beras kepada Pondok Pesantren & Panti Mitra HIK	20,800,000

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah | 29

h.j


No	Tanggal Penyaluran Dana	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
16	31 Desember 2024	Kontribusi HIK untuk Pembelian Karpet di Masjid Ibadillahi Sholihin	Bantuan Karpet untuk Masjid Ibadillahi Sholihin (Masjid tetangga Kantor HIK)	20,000,000
17	30 Desember 2024	Kerjasama BAZNAS Kota Tangerang	Bantuan Program Bingkisan Akhir untuk Fakir - Miskin (Masjid Nurul Falah Karawaci dan Masjid Ibadillahi Sholihin Ciledug) kerjasama dengan Baznas Kota Tangerang	11,900,000


**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini memberikan persetujuan atas Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Tangerang, 29 April 2025

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah


Alfi Wijaya
Direktur Utama




Zahrul Hadiprabowo
Komisaris Utama